

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN
FRAUD PADA PT. BANK BUKOPIN Tbk
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

RINI SETIYAWATI

NIM : 15622113



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN
FRAUD PADA PT. BANK BUKOPIN Tbk
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

RINI SETIYAWATI

NIM : 15622113

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN
FRAUD PADA PT. BANK BUKOPIN Tbk
TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

RINI SETIYAWATI
NIM : 15622113

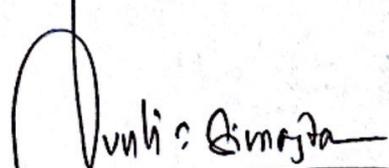
Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Hendy Satria, SE., M.Ak
NIDN. 1015069101/ Lektor

Pembimbing Kedua,



Juhli Edi S., SE., MM., Ak. CA., CfrA
NIDN. 1007057305

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Hendy Satria SE., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul :

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN
FRAUD PADA PT. BANK BUKOPIN Tbk
TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

RINI SETIYAWATI

NIM : 15622113

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Delapan Belas
Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dan Dinyatakan Telah
Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

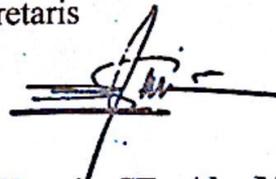
Ketua



Hendy Satria, SE., M.Ak

NIDN. 8823900016/Asisten Ahli

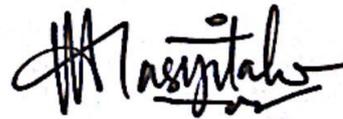
Sekretaris



Sri Kurnia, SE., Ak., M.si., CA

NIDN. 1020037101/Lektor

Anggota



Masyifah As Sahara, SE., M.Si

NIDN. 1010109101/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 18 Agustus 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang



Ketua



Charly Marlinda, SE., M.Ak.Ak.CA

NIDN. 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINI SETIYAWATI
NIM : 15622113
Tahun Angkatan : 2015
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.33
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata 1
Judul Skripsi : *PENGARUH GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DAN WHISTLEBLOWING
TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD
PADA PT. BANK BUKOPIN Tbk.
TANJUNGPINANG.*

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Agustus 2020

Penyusun



RINI SETIYAWATI
NIM: 15622113

HALAMAN MOTTO

“Jika kita terus-terusan melakukan suatu hal yang kecil, kita akan tetap kecil, tidak apa-apa untuk ingin lebih, lakukan yang lebih dan jadilah lebih”

-unknown-

“Jangan mengeluh bila ujianmu berat, bersyukurlah karena kamu sedang diperkuat dan Allah yakin kamu mampu melewatinya.”

- Unknown

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah Wassyukkurillah Wanikmatullah Warahmatullah

Sujud syukurku kusembahkan kepada-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan semesta alam yang menciptakanku dengan bekal yang begitu teramat sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayatmu telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta semangat pantang menyerah dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang ada disetiap umatmu. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat dan Salam selalu ku limpahkan atas keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Ku persembahkan tugas akhir ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasihnya yang berlimpah.

***Teristimewa Ayahanda dan Ibunda tercinta, terkasih, tersayang serta yang terhormat.** Terima kasih karna selama ini selalu mendukung Rini dalam setiap langkah Rini, yang senantiasa mendoakan dan membimbing Rini, yang senantiasa mendengarkan segala keluh kesah Rini dan yang senantiasa selalu berkorban apapun untuk Rini. Terkhusus ibu, terimakasih karna selalu menjadi tumpuan hidup Rini selama ini, yang selalu ada dalam situasi apapun, yang selalu sabar menghadapi tingkah laku serta sikap Rini selama ini. Mungkin ini hanya hadiah kecil yang dapat Rini berikan saat ini, dan juga sebagai kenangan bahwasanya kalian pernah berjuang untuk Rini bisa sampai dititik ini.*

***Tersayang keluarga besar dan sepupu-sepupu yang ku miliki.** Terimakasih atas motivasi yang telah kalian berikan, atas doa yang kalian panjatkan akhirnya Rini dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa bangga. Terkhusus sepupu kentalku, sedunia sepergibahan Kery Rozana terimakasih telah memberikan motivasinya.*

***Teruntuk yang kuhormati kedua dosen pembimbingku.** Izinkan Rini mengucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing I dan II yang telah bersedia mengantarkan Rini mengantungi gelar sarjana, Terima kasih Pak Hendy dan Pak Juhli Edi. Pak, Rini bersyukur menjadi salah satu anak bimbinganmu. Sekali lagi*

Rini ucapkan terima kasih untuk semua kritikan dan tuntunan yang telah bapak berikan. Sebagai mahasiswa yang penuh keterbatasan tentu bapak berulang kali menahan kemarahan dalam menuntun, seluruh bekal yang bapak berikan kepada Rini takkan pernah Rini lupakan dan akan Rini jadikan sebagai modal untuk menjawab tantangan dimasa yang akan datang. Untuk semua, kritikan, dan tuntunan yang diberikan, Rini ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Semoga segala kebaikan selalu menyertai bapak dan keluarga Aamiin.

Teruntuk yang kuhormati, Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf STIE Pembangunan Tanjungpinang. Rini ucapkan terima kasih karena telah memberikan pengajaran yang sangat berarti serta pelayanan pendidikan yang sangat baik yang Rini terima selama ini semoga kelak segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dikemudian hari. Semoga segala kebaikan selalu menyertai bapak dan ibu sekeluarga Aamiin.

Tak lupa, sahabat terbaik dan seperjuanganku, terkhusus Rima Berliani, terimakasih banyak karna selalu membimbing Rini selama masa studi dari awal kuliah hingga akhir, terimakasih selalu meluangkan waktunya untuk belajar bersama menghadapi setiap mata kuliah yang dijalani, bahkan hingga skripsi ini dibuat. Terimakasih selalu ada disaat titik lelah melanda, di titik dimana aku merasa sulit menghadapi suatu hal. Semoga segala kebaikanmu dibalas Allah dan semoga segala kemudahan dan kelancaran dalam hidup selalu tercurahkan untukmu sekeluarga. Aamiin.

Untuk sahabatku, sahabat yang selalu senantiasa disampingku dan mendukungku, Syuhufi, Kak Ria Ukur Rindu Tondang, dan Sherly Anggelyn yang selalu membimbing dan meluangkan waktunya serta sabar membimbing saat belajar untuk menghadapi setiap mata kuliah yang dijalani, dan juga Sri Murni yang sejak awal skripsi ini dibuat bersedia menemani untuk mencari tempat objek penelitian dan terus mensupport.

Dan tak lupa juga sahabat kentalku, Geng Semata Wayang, Eka Putri Anggraini dan Annisa Aulia terimakasih banyak atas segala waktu, dukungan, motivasi, nasehat, serta semangat yang telah kalian berikan.

Serta teman seperjuangan yang saya kasihi (Akuntansi Sore 1, 2015) Kalian tetap yang teristimewa sepanjang perjalanan perkuliahan yang kita tempuh bersama. Sukses untuk kita bersama.

Skripsi ini ku persembahkan untuk

STIE Pembangunan Tanjungpinang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* DAN *WHISTLEBLOWING* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PT. BANK BUKOPIN Tbk. TANJUNGPINANG” ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak. CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E.,M.Si.Ak.CA, selaku wakil ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E.,Ak.M.Si.CA, selaku Wakil ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang serta sekaligus sebagai ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M selaku plt Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, SE.,M.,Ak selaku plt Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang serta sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Masyitah As Sahara, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
7. Bapak Juhli Edi Simanjuntak. SE.,MM.,Ak.,CA.,CFrA selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staff STIE Pembangunan yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan serta membantu saya selama perkuliahan maupun menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Responden saya yang berada di PT. Bank Bukopin Tanjungpinang yang telah membantu penulis dalam pengisian data kuesioner sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Tanjungpinang, Agustus 2020

Penulis

RINI SETIYAWATI
NIM. 15622113

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Ilmiah	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori.....	9
2.1.1 Pencegahan <i>Fraud</i>	9
2.1.2 <i>Good Corporate governance</i>	13
2.1.3 Sistem Pengendalian Internal (SPI).....	24
2.1.3.1 Unsur-Unsur Pengendalian Internal.....	26
2.1.3.2 Komponen Sistem Pengendalian Internal	27
2.1.3.3 Fungsi Pengendalian Internal di Bank Bukopin	31

2.1.4 Pelaporan Kecurangan (<i>Whistleblowing</i>)	35
2.2 Kerangka Pemikiran.....	42
2.3 Hipotesis.....	43
2.4 Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Jenis Data	49
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.4 Populasi Dan Sampel	50
3.4.1 Populasi	50
3.4.2 Sampel.....	51
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	52
3.6 Teknik Pengolahan Data	55
3.7 Metode Analisis Data.....	56
3.7.1 Analisis Kualitas Data	56
3.7.1.1 Uji Validitas Data	56
3.7.1.2 Uji Reliabilitas	57
3.7.2 Analisis Asumsi Klasik	58
3.7.2.1 Uji Normalitas.....	58
3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	59
3.7.2.3 Uji Autokorelasi.....	59
3.7.2.4 Uji Multikolinearitas	60
3.7.3 Uji Regresi Linear Berganda	60
3.7.4 Uji Hipotesis.....	61
3.7.4.1 Uji F (F-test)	62
3.7.4.2 Uji T (t-test)	63
3.7.5 Koefisien Determinasi	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Instansi.....	65
4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Bukopin Tanjungpinang.....	65
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	67

4.2 Sampel dan Responden Penelitian	76
4.3 Analisis Deskriptif	78
4.4 Distribusi Hasil Jawaban Responden.....	80
4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas	97
4.5.1 Uji Validitas	97
4.5.2 Uji Reliabilitas.....	99
4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	100
4.6.1 Uji Normalitas Residual	100
4.6.2 Uji Heteroskedastisitas	102
4.6.3 Uji Autokorelasi	103
4.6.4 Uji Multikolinearitas	104
4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	105
4.8 Uji Hipotesis.....	107
4.8.1 Uji T	107
4.8.2 Uji F.....	108
4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	110
4.10 Pembahasan Hasil Penelitian	110
4.10.1 Pembahasan Secara Simultan.....	110
4.10.2 Pembahasan Secara Parsial	111
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 3.1 Daftar Karyawan PT. Bank Bukopin Tanjungpinang	52
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	53
Tabel 4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	77
Tabel 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	78
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.....	79
Tabel 4.4 Jawaban Responden Terhadap Kuesioner Variabel X_1	80
Tabel 4.5 Jawaban Responden Terhadap Kuesioner Variabel X_2	88
Tabel 4.6 Jawaban Responden Terhadap Kuesioner Variabel Y	92
Tabel 4.7 Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	97
Tabel 4.8 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	99
Tabel 4.9 Uji Normalitas Residual	101
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi	104
Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas	105
Tabel 4.12 Analisis Regresi Linear Berganda.....	106
Tabel 4.13 Hasil Uji T	107
Tabel 4.14 Hasil Uji F	109
Tabel 4.15 Koefisien Determinasi.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT. Bank Bukopin Tanjungpinang	68
Gambar 4.2	Grafik Normal P-Plot.....	102
Gambar 4.3	Grafik <i>Scatterplot</i>	103

ABSTRAK

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *WHISTLEBLOWING* TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PT.BANK BUKOPIN Tbk TANJUNGPINANG

Rini Setiyawati, 15622113. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang
rini.setiyawati18@gmail.com

Kata Kunci : *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing*, Pencegahan *Fraud*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing* terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT. Bank Bukopin Tbk. Tanjungpinang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Bank Bukopin Tbk. Tanjungpinang. Besaran sample dalam penelitian ini sebesar 63 karyawan. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah Total Sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner yang terdiri dari 35 butir pertanyaan. Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 21. Hasil penelitian ini sudah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan analisis koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable *Good Corporate Governance* (X1) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dapat dilihat dari nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,261 > 2,000$). Sedangkan variable *Whistleblowing* berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini ditunjukkan bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,912 > 2,000$). Maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

Referensi : 28 Buku + 12 Skripsi + 5 Jurnal Nasional + 5 Jurnal Internasional

Dosen Pembimbing : 1. Hendy Satria, SE. M. Ak
2. Juli Edi Simanjuntak S.E.,MM.,CA.,CFrA

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND WHISTLEBLOWING ON FRAUD PREVENTION AT PT. BUKOPIN Tbk TANJUNGPINANG

*Rini Setiyawati, 15622113. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang
rini.setiyawati18@gmail.com*

*Keywords : Good Corporate Governance dan Whistleblowing, Pencegahan
Fraud.*

*The purpose of this research is to examine whether there is an influence of
Good Corporate Governance and Whistleblowing on Fraud Prevention at PT. Bank
Bukopin Tbk. Tanjung Pinang*

*This research is a quantitative research. The population on this research is
all staffs in PT. Bank Bukopin Tbk. Tanjungpinang. The sample in this research is
63 staffs. The sampling technique in this research is total sampling. The instrument
used in this research is a questionnaire consisting of 35 questions. Data processing
using SPSS Version 21. The results of this research has meet the requirements of
Validity and Reliability. The analytical method used in this research is the classic
assumption test, multiple linear regression test, hypothesis test, and coefficient of
determination analysis.*

*The result of the research shows that Good Corporate Governance (X1)
variable has positive significant effect on fraud prevention. This could be seen from
the value of $T_{count} > T_{table}$ ($2,261 > 2,000$). Meanwhile whistleblowing variable
has positive significant effect on fraud prevention. This shows that $T_{count} > T_{table}$
($2,912 > 2,000$). So it can be concluded that Good Corporate Governance and
Whistleblowing has effect on Fraud Prevention.*

*Reference : 28 Books + 12 Essays + 5 National Journals + 5
International Journals*

*Lecturers : 1. Hendy Satria, SE. M. Ak
2. Juli Edi Simanjuntak S.E.,MM.,CA.,CFrA*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis di dunia perbankan saat ini semakin luas, baik produk bank ataupun jasa bank sehingga menimbulkan persaingan yang ketat antara bank satu dengan bank yang lain. Dalam hal ini terutama persaingan dalam memasarkan produk-produk bank. Persaingan ini memunculkan ide-ide baru sehingga adanya strategi dalam bersaing memasarkan produk-produk. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara jaminan perusahaan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan *stakeholders* lainnya.

Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. *Good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam paradigma ini, dewan komisaris pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai.

Mengingat bahwa akhir-akhir ini *corporate governance* merupakan adalah suatu topik pembahasan sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya tentang kecukupan *corporate governance* dan kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan.

Kecurangan akuntansi dalam bahasa pengauditan disebut *fraud*. *Fraud* adalah tindakan yang terjadi karena adanya peluang untuk melakukan salah saji dalam laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Salah satu cara mencegah kecurangan akuntansi sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan

whistleblowing. *Whistleblowing* adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun non aktif mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi (Suwardjono, 2014). *Whistleblowing* merupakan cara yang tepat untuk mencegah terjadinya kasus kecurangan terjadi pada pelaporan keuangan yang merugikan perusahaan ataupun pihak lain. *Whistleblowing* menurut KNKG di dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Sedangkan seseorang yang melakukan *whistleblowing* disebut pelapor pelanggaran atau *whistleblower*.

Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan sengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Bank sebagai lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan juga membutuhkan strategi pemasaran untuk memasarkan produknya. Dalam melakukan pemasaran, Bank memiliki beberapa sasaran yang hendak di capai artinya, nilai penting pemasaran bank terletak dari tujuan yang ingin dicapai

tersebut seperti dalam hal meningkatkan mutu pelayanan dan menyediakan ragam produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Tanjungpinang merupakan salah satu perbankan yang terdapat di Kota Tanjungpinang yang telah berdiri selama hampir 10 Tahun dan menjalankan bisnis layaknya perbankan lainnya yang telah dahulu menjalankan kegiatan perbankan. Bank Bukopin sebelumnya bernama Bank Umum Koperasi Indonesia yang berdirinya tanggal 10 Juli 1970 menfokuskan diri pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumen.

PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Tanjungpinang dalam menjalankan aktivitasnya tidak terlepas dari penyusunan laporan keuangan yang telah terintegrasi dengan sistem yang memadai. pencatatan-pencatatan yang dilakukan juga dilakukan secara otomatis dari aplikasi yang tersedia sehingga keakuratan dan keandalan laporan yang disusun sudah tidak diragukan lagi dalam segi informasi yang disajikan. Terkendalanya aktivitas akuntansi yang terjadi, dikarenakan faktor sumber daya manusia yang berada di lingkungan PT Bank Bukopin Tbk.

Fenomena permasalahan yang terjadi pada Bank Bukopin Cabang Tanjungpinang dijelaskan bahwa terdapat beberapa kasus yang terjadi dalam proses bisnis maupun proses pencatatan akuntansi pada tahun 2019 yang telah menjadi perhatian penting bagi manajemen Bank Bukopin Cabang Tanjungpinang.

Beberapa kasus yang terjadi antara lain, Penggelapan uang kas nasabah yang dilakukan oleh oknum yang memiliki wewenang dalam menjaga fisik uang tersebut sehingga dalam kasus ini bank hampir mengalami kerugian yang nilainya cukup material. Kejadian ini terjadi melibatkan unit operasional kas yang memiliki tanggung jawab untuk memegang kunci khasanah atau brankas sehingga memiliki akses untuk melakukan tindak kejahatan dalam penggelapan fisik uang.

Selain itu, terdapat penyaluran kredit yang bersifat fiktif dan tidak tepat sasaran sehingga banyaknya kredit atau pinjaman yang mengalami macet dalam pembayaran kewajiban kembali. Kejadian ini didasari adanya kerjasama antara bagian marketing yang mengelola kredit dengan debitur yang akan melakukan proses peminjaman yang fiktif, yang secara analisa untuk syarat kreditnya tidak bisa dipenuhi.

Dan juga adanya penggunaan biaya kantor yang di *mark up* untuk pembelian keperluan kantor. Penggunaan biaya ini hanya bisa dilakukan oleh pihak manajemen kantor cabang yang memiliki limitasi untuk pengeluaran biayanya dan unit pengadaan logistik selaku pelaksanaan atas pengeluaran biaya fiktifnya.

Administrasi dokumen pendukung (bukti transaksi) yang belum terkendali dengan baik sehingga dalam beberapa proses hukum mengakibatkan kerugian. Untuk dokumen hampir seluruh unit di Bank Bukopin harus melakukan administrasi dengan baik. Karena memiliki legalitas yang akan dipertanggungjawabkan apabila adanya klaim atau tuntutan dari pihak nasabah.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat dibuat suatu judul usulan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan**

***Whistleblowing* terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk itu dalam penyusunan penelitian ini, dirumuskan masalah sebagai dasar kajian penelitian yang dilakukan seperti:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang?
2. Apakah *whistleblowing* berpengaruh terhadap Pencegahan *fraud* pada PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang?
3. Apakah *good corporate governance* dan Pelaporan Kecurangan (*whistleblowing*) berpengaruh terhadap Pencegahan *fraud* pada PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap Pencegahan *fraud* pada PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing* terhadap Pencegahan *fraud* pada PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang.

3. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan *whistleblowing* terhadap Pencegahan *fraud* pada PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana keterkaitan antara *good corporate governance* dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk PT. Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang dalam hal Pencegahan *Fraud*.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan landasan teori berupa penjabaran teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis serta sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian lainnya. Bab ini juga akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti serta hipotesis yang timbul dari pemikiran tersebut.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisikan deskripsi bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional. Bab ini akan berisikan variabel penelitian dan definisi operasional variabel penelitian penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai variabel penelitian

BAB V Penutup

Berisi uraian Simpulan, Keterbatasan, implikasi teoritis, implikasi manajerial dan Saran. Bagian akhir, terdiri dari : Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pencegahan *Fraud*

Istilah *fraud* (Inggris) atau *fraude* (Belanda) sering diterjemahkan sebagai kecurangan, (ACFE, 2017) Sering juga kecurangan (*fraud*) secara sederhana diartikan dengan ketidak-jujuran.

Association of Certified Fraud Examiners dalam (Kasmir, 2014) mengkategorikan kecurangan (*fraud*) menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Korupsi (*Corruption*) Korupsi didefinisikan sebagai “*Spoiled; tainted; depraved; debased; morally degenerate*. Skema korupsi (*corruption schemes*) dapat dipecah menjadi empat klasifikasi: (1) pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), (2) suap (*bribery*), (3) pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan (4) pemerasan ekonomi (*economic extortion*)”.
- b. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) penyalahgunaan kas (*cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk *skimming*, *larceny* atau *fraudulent disbursements*, dan (2) penyalahgunaan non-kas (*non-cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan (*misuse*) atau pencurian (*larceny*) terhadap persediaan dan aset-aset lainnya.

- c. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*)
- Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement schemes*) dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan (1) mencatat pendapatan-pendapatan fiktif (*fictitious revenues*), (2) mencatat pendapatan (*revenue*) dan/atau beban (*expenses*) dalam periode yang tidak tepat, (3) menyembunyikan kewajiban dan beban (*concealed liabilities and expenses*) yang bertujuan untuk mengecilkan jumlah kewajiban dan beban agar perusahaan tampak lebih menguntungkan, (4) menghilangkan informasi atau mencantumkan informasi yang salah secara sengaja dari catatan atas laporan keuangan (*improper disclosures*), atau (5) menilai aset dengan tidak tepat (*improper asset valuation*).

(Suwardjono, 2014) menyebutkan bahwa terdapat tiga kondisi mengapa seseorang melakukan *fraud* yang kemudian disebut dengan *fraud triangle*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga kondisi (*fraud triangle*) adalah sebagai berikut :

1. Tekanan (*Pressures*) Terdapat tekanan yang berbeda yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan *fraud*. Arens mendefinisikan *perceived pressures* sebagai situasi dimana manajemen atau karyawan memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
2. Kesempatan (*opportunities*) Kesempatan (*opportunity*) adalah situasi dimana seseorang percaya bahwa dia memiliki keadaan yang menjanjikan atau memungkinkan untuk melakukan *fraud* dan tidak dapat terdeteksi yang menyebutkan bahwa kesempatan untuk melakukan atau menyembunyikan

fraud harus ada agar *financial statement fraud* dapat terjadi. Kesempatan dapat timbul akibat kurangnya pengawasan dewan direksi maupun komite audit, pengendalian internal yang lemah, transaksi yang tidak biasa ataupun rumit, estimasi akuntansi yang membutuhkan penilaian subjektif yang signifikan, dan staf audit internal yang tidak efektif. Pada umumnya *fraud* tidak berhasil dilakukan pada organisasi yang memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, dan para karyawan yang menyadari bahwa pengendalian-pengendalian tersebut dibuat untuk mencegah *fraud*.

3. Rasionalisasi (*rationalization*) Rasionalisasi adalah hadirnya sebuah perilaku, karakter, atau kumpulan nilai etis yang membiarkan manajemen atau karyawan secara sengaja melakukan sebuah tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang membebankan tekanan yang cukup yang menyebabkan mereka untuk merasionalisasikan atau membenarkan sebuah tindakan yang tidak jujur.

Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi *fraud* disebutkan dalam SA seksi 110 (IAPI, 2011), Ikatan Akuntansi Indonesia (2011) bahwa: Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan.

(Widyaiswara, 2011) menjelaskan bahwa tidak ada instansi yang akan mampu membangun suatu program dan pengendalian untuk meminimalkan *fraud* tanpa mampu mengidentifikasi risiko yang harus diatasi atau diminimalkan. Namun demikian jarang sekali instansi yang telah memiliki gugus tugas (*task force*) untuk

menilai risiko *fraud*. Penilaian risiko *fraud* merupakan tonggak penting dalam program anti-*fraud* untuk mengantisipasi (bukan sekedar bereaksi atas) terjadinya *fraud* dan penyalahgunaan wewenang. Instansi yang tidak menjalankan penilaian atas risiko *fraud*, umumnya juga jarang mengkaitkan antara aktivitas pengendalian preventif dan detektif untuk meminimalkan risiko *fraud* yang teridentifikasi. Apabila penilaian risiko *fraud* telah ditetapkan maka instansi diminta untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menguji desain efektifitas program pengendalian anti-*fraud*.

Meskipun audit dan monitoring merupakan bagian integral dari kerangka kerja SPIP, instansi publik umumnya jarang melakukan audit dan pemantauan khususnya yang terkait dengan *fraud*. Melalui program fasilitasi oleh internal audit, program monitoring *fraud* merupakan bagian dari aktivitas operasi sehari-hari. Sebagai tambahan, bagian internal audit harus menuangkan program penilaian risiko dalam rencana kerja tahunannya.

(Halim, 2012) menambahkan bahwa penilaian risiko *fraud* yang efektif akan dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang tidak terdeteksi dan memperkuat kemampuan organisasi dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* serta penyalahgunaan sebelum menjadi skandal bagi instansi. Selain itu penilaian risiko *fraud* dapat mengidentifikasi penghematan biaya yang timbul dibandingkan dengan biaya penilaian secara langsung. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penilaian risiko *fraud* menurut (Pratiwi, 2015) mencakup:

1. Mengorganisasikan penilaian risiko berdasarkan siklus tugas pokok dan fungsi instansi atau siklus kemungkinan terjadinya *fraud*.

2. Menetapkan unit dan lokasi untuk dinilai
3. Mengidentifikasi skema dan skenario potensi terjadinya *fraud* dan penyalahgunaan wewenang.

Menilai kemungkinan terjadinya dan tingkat signifikansi risiko.

2.1.2 *Good Corporate Governance*

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Wati, 2012). *Corporate governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *corporate governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.

Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate governance* sebagai berikut : “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak

kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”. *Corporate governance* menurut (Sutedi, 2011) adalah : “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN menyatakan : “*Corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini

sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru.

OECD mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mengisyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. *corporate governance* yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan atau pemegang saham dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien (Pasorong, 2012). Sedangkan menurut Bank Dunia (*world bank*) dalam mendefinisikan *corporate governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah - kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber - sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Dari penjelasan beberapa ahli diatas peneliti menggunakan definisi *Corporate governance* dari OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), *corporate governance* merupakan Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi

Board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Karena *Corporate governance* dari OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mencakup dan sesuai dengan kegunaan serta karakteristik dari AP2T, yaitu Aplikasi AP2T adalah sistem yang merupakan bagian dari perangkat yang merupakan syarat dari *corporate governance* guna mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja, AP2T dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, meningkatkan kinerja perusahaan serta meningkatkan pengawasan agar mengurangi-kecurangan yang dapat terjadi dalam melakukan pekerjaan sehingga kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien.

Good corporate governance menurut (Fajarwaty, 2011) merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para stakeholder lainnya. Suatu sistem pengecekan dan pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan dan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

Dari pengertian tersebut, tampak beberapa aspek penting dari GCG yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis yakni:

- a. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan direksi.

Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).

- b. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* (keseimbangan eksternal). Diantaranya tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.
- c. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.
- d. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip *good*

corporate governance menurut peraturan Menteri Negara Badan Usaha Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 adalah :

1. *Transparancy* (Keterbukaan) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, pelaksana dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi.
4. *Fairness* (Kewajaran) Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
5. *Independency* (Kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan

hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. *good corporate governance* akan memberikan empat manfaat besar yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Meningkatkan *corporate value*.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

Ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* menurut (Hery, 2011), yaitu :

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi

Dalam penerapan *good corporate governance* pada perbankan dibutuhkan unsur yang mendukung. Unsur-unsur dalam GCG yaitu :

a. *Corporate governance* – Internal Perusahaan Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :

- 1) Pemegang saham, tugasnya adalah merancang dan menentukan rencana bisnis, menunjuk dan memberhentikan direksi perusahaan dan memeriksa laporan keuangan.
- 2) Direksi, tugasnya adalah membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan rapat direksi. Selain itu membuat laporan tahunan, dokumen keuangan Perusahaan, dan memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan.
- 3) Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban atas kebijakan pengurusan perusahaan, serta memberi nasihat kepada direksi. Adapun, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- 4) Manajer, tugasnya adalah memimpin, mengawas dan mengendalikan perusahaan. Selain itu manajer juga bertugas untuk mengevaluasi aktivitas perusahaan.
- 5) Karyawan, tugasnya adalah melakukan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- 6) Komite audit, tugasnya adalah melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan

Perusahaan dan melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan informasi keuangan Perusahaan yang akan disampaikan kepada publik.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi :

- 1) Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*);
- 2) Transparansi;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Kesetaraan;
- 5) Aturan dari *code of conduct*.

b. *Corporate governance* – External Perusahaan Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah :

- 1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum;
- 2) Investor;
- 3) Institusi penyedia informasi;
- 4) Akuntan publik;
- 5) Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
- 6) Pemberi pinjaman;
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:

- 1) Aturan dari *code of conduct*;
- 2) Kesetaraan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Jaminan hukum.

Perilaku partisipasi pelaku *corporate governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas *corporate governance*.

OCED (*The Organization for Economic and Development*) memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercipta *good corporate governance* dalam suatu perusahaan dalam (Kartika, 2014), yaitu;

1. Perlindungan terhadap hak-hak dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hal-hal dasar pemegang saham, yaitu:
 - a) Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode Pendaftaran kepemilikan;
 - b) Hak untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan saham;
 - c) Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur;
 - d) Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - e) Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi;
 - f) Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan.
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip

ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self dealing*). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*).

3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholders*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesenambungan usaha (*going concern*).
4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal (KAP) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibilities of the board*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus

menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Setiap perusahaan harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka perusahaan bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi perusahaan adalah sistem pengendalian internal.

Menurut (Mulyadi, 2014) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi

dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian internal menurut (IAPI, 2011) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pendapat lain dikemukakan (Tunggal, 2014) Pengendalian Internal adalah suatu proses yang yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

1. keandalan pelaporan keuangan
2. Efektifitas dan efisiensi operasi,
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Selain itu pendapat lain diungkapkan oleh (James, 2011) pembuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal adalah kewajiban pihak manajemen yang penting. Aspek mendasar dari tanggung jawab penyediaan informasi pihak manajemen adalah untuk memberikan jaminan yang wajar bagi pemegang saham bahwa perusahaan dikendalikan dengan baik. Selain itu pihak manajemen bertanggung jawab untuk melengkapi pemegang saham serta investor dengan informasi keuangan yang andal dan tepat waktu.

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian intenal menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang

ada di dalam perusahaan.

2.1.3.1 Unsur-unsur Pengendalian internal

Menurut (Mulyadi, 2014) unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur, yaitu:

1. **Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas.** Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
2. **Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.** Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
3. **Praktik yang sehat.** Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. **Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.** Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang

dapat diandalkan.

2.1.3.2 Komponen Sistem Pengendalian Internal

Menurut (Wiratna, 2015) sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik. Beberapa komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal adalah:

- a. Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Dalam perusahaan harus selalu ditanamkan etika di mana jika etika itu dilanggar itu merupakan penyimpangan.
- b. Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai oleh manajemen, artinya di sini bahwa manajemen akan menegakkan peraturan. Jika yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas.
- c. Struktur Organisasi
 - 1) Metode pembagian tugas dan tanggung jawab, Dalam perusahaan harus jelas dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 2) Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia, Perusahaan dalam memilih karyawan harus selektif dan melalui prosedur tes yang semestinya bukan nepotisme dan sejenisnya.

- 3) Pengaruh dari luar, Apabila lingkungan dalam perusahaan sudah baik, maka pengaruh dari luar yang buruk akan mudah bersama-sama ditangkal dan pengaruh yang baik akan lebih mudah diterima.

2. Penaksiran Resiko

Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar. Ada tiga kelompok risiko yang dihadapi perusahaan, yaitu:

- a. Risiko strategis, yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang salah (misalnya: harusnya dikerjakan dengan komputer ternyata dikerjakan secara manual).
- b. Risiko finansial, yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena uang hilang, dihambur- hamburkan, atau dicuri.
- c. Risiko informasi, yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan atau informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasinya tidak dapat dipercaya.

3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. Committee of Sponsoring Organizations (COSO) mengidentifikasi setidaknya-tidaknya ada lima hal yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu:

- a. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan.

Otorisasi dengan cara membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari atasan. Contoh: untuk meminta pergantian peralatan kantor maka bagian pembelian harus meminta persetujuan dari pimpinan dari bagian keuangan, persetujuan dari pimpinan keuangan itu dibuktikan dengan tanda tangan.

- b. Pembagian tugas dan tanggung jawab.

Pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat perusahaan.

- c. Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik.

Dokumen sebaiknya mudah dipakai oleh karyawan, dokumen dibuat dengan bahan yang berkualitas agar bertahan lama jika disimpan.

- d. Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan.

Perlindungan yang ketat ini meliputi:

- 1) Antara pencatat dan pembawa kas harus berbeda orangnya.
- 2) Tersedia tempat penyimpanan yang baik.
- 3) Pembatasan akses ruang – ruang yang penting.

- e. Pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan.

Pemeriksaan kinerja ini dapat dilakukan dengan salah satu langkah berikut:

- 1) Membuat rekonsiliasi/pencocokan antara catatan perusahaan dengan bank, maupun rekonsiliasi antara dua catatan yang terpisah mengenai suatu rekening.
- 2) Melakukan stok opname yaitu mencocokkan jumlah unit persediaan

di gudang dengan catatan persediaan.

3) Menjumlah berbagai hitungan dengan cara batch totals, yaitu penjumlahan dari atas ke bawah.

4. Informasi dan Komunikasi

Merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui hal-hal berikut ini :

- a. Bagaimana transaksi diawali.
- b. Bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap dimasukkan ke sistem komputer.
- c. Bagaimana file data dibaca, diorganisasi, dan diperbaharui isinya.
- d. Bagaimana data diproses agar menjadi informasi dan informasi diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan
- e. Bagaimana informasi yang baik dilakukan.
- f. Bagaimana transaksi berhasil.

5. Pemantauan

Kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat segera diambil tindakan. Berbagai bentuk pemantuan di dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu atau semua proses berikut ini :

- a. Supervisi yang efektif, yaitu manajemen yang lebih atas dapat mengawasi manajemen dan karyawan di bawahnya.
- b. Akuntansi pertanggungjawaban yaitu perusahaan menerapkan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-

masing manajer, masing-masing departemen, dan masing-masing proses yang dijalankan oleh perusahaan.

- c. Audit internal yaitu pengauditan yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan.

2.1.3.3 Fungsi Pengendalian Internal Di PT. Bank Bukopin Tbk

Berdasarkan (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 7/SEOJK.03/2016, 2016) tentang standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Bukopin bahwa PT. Bank Bukopin merupakan lembaga keuangan yang salah satu usahanya menghimpun dana masyarakat sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola. Salah satu faktor yang penting bagi Bank Bukopin dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan audit intern yang efektif dan memadai. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif di Bukopin, perlu disusun suatu Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Bukopin untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan audit intern sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh Bank Bukopin di Indonesia.

Terpenuhinya kepentingan Bank Bukopin dan masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi audit intern Bank Bukopin, mengingat terdapat berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak, baik pemilik, pengurus, pegawai maupun nasabah. Dalam kaitan ini, audit intern harus dapat menempatkan fungsinya di atas kepentingan berbagai pihak tersebut untuk memastikan terwujudnya Bank Bukopin yang sehat, berkembang secara wajar dan mampu

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Direksi dan Dewan Komisaris perlu menetapkan kebijakan dan kegiatan di bidang pengawasan dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kepentingan Bank Bukopin dan masyarakat dapat terpelihara secara serasi, dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Beberapa aspek yang memerlukan kejelasan dan kesamaan pemahaman agar kebijakan dan kegiatan tersebut dapat terwujud diantaranya adalah tanggung jawab dan wewenang pengawasan dari Direksi dan Dewan Komisaris, ruang lingkup pengendalian intern, dan pekerjaan audit intern dalam hubungannya dengan sistem pengendalian intern Bank Bukopin. Sistem pengendalian intern merupakan mekanisme pengendalian yang dibangun untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank Bukopin, mengurangi dampak kerugian termasuk kecurangan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya. Fungsi audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan mendukung terlaksananya sistem pengendalian intern yang efektif.

1. Ruang Lingkup Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode dan ketentuan yang terkoordinasi secara menyeluruh pada satuan kerja Bank Bukopin. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Ruang lingkup pengendalian intern Bank Bukopin meliputi juga aspek-aspek yang mampu

menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak ketiga lainnya.

2. Audit Intern sebagai Bagian dari Sistem Pengendalian Intern

Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan Bank Bukopin sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama Bank Bukopin dengan persetujuan Dewan Komisaris. Secara berkala kebijakan audit intern ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Fungsi Audit Intern

Tugas SKAI atau PE Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Bank Bukopin yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, SKAI atau PE Audit Intern membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Selain itu, SKAI atau PE Audit Intern harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana

4. Independensi

SKAI atau PE Audit Intern harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit sebagaimana pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern ini.

5. Wewenang dan Kedudukan

SKAI atau PE Audit Intern harus diberi wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

6. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern

Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup seluruh aspek kegiatan Bank Bukopin yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan Bank Bukopin dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Bank Bukopin sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

7. Etika Auditor Intern

Auditor Intern harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu

pada *Code of Ethics dari The Institute of Internal Auditors*. Kode etik tersebut paling sedikit memuat keharusan untuk:

- a. berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab
- b. memiliki dedikasi tinggi
- c. tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya
- d. menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan
- e. terus meningkatkan kemampuan profesionalnya

2.1.4 Pelaporan Kecurangan (*Whistleblowing*)

(Baridwan, 2011) *Whistleblowing* didefinisikan sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja.

Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus dilakukan dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan

tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.(Atmawinata, 2014).

Menurut Staley dan Lan dalam (Akmal, 2012) mengatakan bahwa *whistleblowing* adalah cara yang tepat untuk mencegah dan menghalangi kecurangan, kerugian, dan penyalahgunaan.

(Komite Nasional Kebijakan governance (KNKG), 2013) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai pengungkapan oleh seseorang mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat bekerja.

Dari beberapa pengertian *whistleblowing* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing* merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengungkap atau melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan atau tindakan yang melawan hukum yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. (Elias, 2012) menyatakan bahwa *whistleblowing* dapat terjadi dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*external*). Internal *whistleblowing* dapat terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Sedangkan *external whistleblowing* terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan dan kemudian memberitahukannya kepada masyarakat karena kecurangan tersebut akan merugikan masyarakat.

Whistleblower adalah seseorang yang mengungkap atau melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan (*whistleblowing*). Pada dasarnya *whistleblower* adalah

karyawan dari organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. *Whistleblower* biasanya mempunyai data atau bukti yang memadai terkait tindakan yang melawan hukum tersebut. Peran *whistleblower* sangatlah penting dalam mengungkap suatu tindakan melawan hukum di dalam internal organisasi.

Peran *whistleblower* sebagai salah satu bentuk pengawasan kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan *whistleblower* dapat diperankan oleh siapa saja yang mengetahui tindak kecurangan dalam organisasi. Namun, banyak orang yang takut untuk mengadukan tindak kecurangan, karena tak sedikit risiko yang harus dihadapi, bahkan sulit dihindari dan solusinya mereka lebih memilih untuk diam. Mulai dari pemecatan pihak organisasi tempat ia bekerja dan ancaman terlapor pada dirinya dan keluarganya. Jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* juga sudah ada sejak tahun 2006 dengan lahirnya UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut merupakan salah satu pendorong atau motivasi seseorang untuk menjadi *whistleblower*.

Seorang *whistleblower* dalam upaya mengungkap suatu tindak pelanggaran dan kecurangan, baik di perusahaan atau suatu lembaga pemerintahan, memang dapat dilatarbelakangi berbagai motivasi, seperti pembalasan dendam ingin “menjatuhkan” perusahaan tempatnya bekerja, mencari “selamat”, atau niat untuk menciptakan lingkungan perusahaan tempatnya bekerja menjadi lebih baik dan lebih beretika. Yang jelas seorang *whistleblower* memiliki motivasi pilihan etis yang kuat untuk berani mengungkap skandal kejahatan terhadap publik. *Whistleblower* memiliki suara hati yang memberi petunjuk kuat mengenai pentingnya sebuah skandal untuk diungkap

Sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa mengenai kriteria kecurangan yang dilaporkan yang meliputi 5W+1H, tindak lanjut dari laporan tersebut, reward dan perlindungan bagi sang pelapor atau *whistleblower*, dan hukuman atau sanksi untuk terlapor. Sistem ini merupakan wadah atau saluran bagi *whistleblower* untuk mengungkap dan melaporkan tindak kecurangan. Sistem ini dibentuk oleh Komite Audit perusahaan dan berdasarkan peraturan OJK Nomor: IX .1.5 yang mewajibkan Komite Audit untuk menangani pengaduan, dan *Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section 310* tentang *Public Company Audit Committee* yang mengharuskan Komite Audit untuk menerima, menelaah, dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan masalah akuntansi, pengendalian internal, dan auditing, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini dilakukan tujuan untuk mendeteksi, meminimalisir dan kemudian menghilangkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan pihak internal organisasi.

Menurut (Abdul Haris Semendawai, 2011), program *whistleblowing* yang baik dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa *whistleblowing system* yang efektif harus memenuhi 4 elemen berikut:

1. Anonimitas

Sebuah sistem yang baik harus merahasiakan identitas seorang *whistleblower*, karena tanpa rasa takut untuk melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan di dalam organisasi. Ketika sebuah laporan tersebut merupakan bagian dari sebuah kejahatan, maka dapat memudahkan

untuk menginvestigasi pelanggaran yang dilaporkan.

2. Independensi

Seorang karyawan akan merasa nyaman jika pelanggaran yang ia laporkan ditindaklanjuti oleh pihak yang independen, artinya tidak ada hubungan dengan pihak organisasi maupun pihak yang melakukan pelanggaran.

3. Akses yang mudah

Karyawan harus mempunyai beberapa saluran untuk melaporkan tindak pelanggaran. Diantaranya dapat melalui telepon, *e-mail*, sistem online, dan *faximile*. Hal ini menjamin semua karyawan (dari manajer puncak hingga buruh) bias dengan merahasiakan namanya untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui saluran-saluran tersebut.

4. Tindak lanjut

Pelanggaran yang dilaporkan melalui *whistleblowing* sistem kemudian ditindaklanjuti untuk menentukan tindakan yang diperlukan dalam menyelidiki suatu pelanggaran. Hal ini akan menunjukkan manfaat dari sistem tersebut dan dapat mendorong karyawan untuk lebih aktif lagi melaporkan tindak pelanggaran.

Adapun beberapa manfaat dari penyelenggaraan *whistleblowing system* yang baik menurut KNKG, antara lain:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan kecurangan, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya kecurangan, karena

kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.

3. Tersedianya mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum dan
8. Memberikan masukan kepada perusahaan untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Menurut (Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), 2013) sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang baik memberikan fasilitas dan perlindungan (*whistleblower protection*) sebagai berikut:

1. Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email);
2. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor;
3. Perlindungan atas tindakan balasan dari telapor atau perusahaan;
4. Informasi tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan.

Mekanisme *whistleblowing* adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media

bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan terjadi dalam suatu perusahaan. Di dalam perusahaan umumnya terdapat 2 cara sistem pelaporan agar dapat berjalan dengan efektif, adapun 2 cara sistem pelaporan tersebut, yaitu:

1. Mekanisme Internal

Sistem pelaporan internal umumnya dilakukan melalui saluran komunikasi yang sudah baku dalam perusahaan. Sistem pelaporan internal *whistleblower* perlu ditegaskan kepada seluruh karyawan. Dengan demikian, karyawan dapat mengetahui otoritas yang dapat menerima laporan. Berbagai bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan karyawan yang berperan sebagai *whistleblower*, misalnya: perilaku tidak jujur yang berpotensi atau yang mengakibatkan kerugian finansial perusahaan; pencurian uang atau aset; perilaku yang mengganggu atau merusak keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan kesehatan.

Aspek kerahasiaan identitas *whistleblower*, jaminan bahwa *whistleblower* mendapat perlakuan yang baik, seperti tidak diasingkan atau dipecat, perlu dipegang oleh pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris sangat penting. Pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris juga berperan sebagai orang yang melindungi *whistleblower*.

2. Mekanisme Eksternal

Dalam sistem pelaporan secara eksternal diperlukan lembaga di luar perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan *whistleblower*. Lembaga ini memiliki komitmen tinggi terhadap perilaku

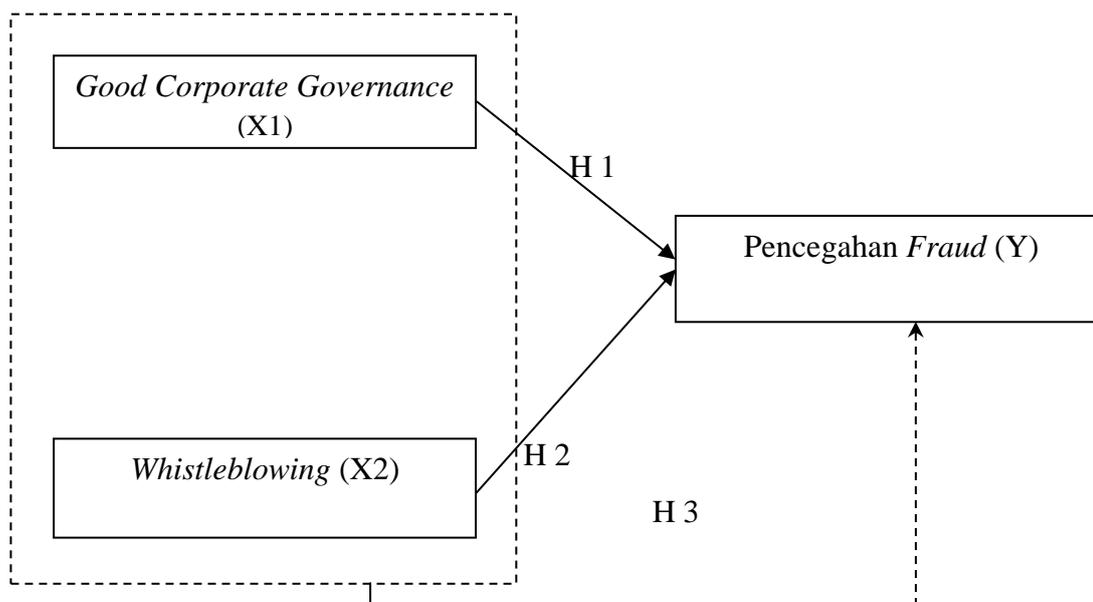
yang mengedepankan standar legal, beretika, dan bermoral pada perusahaan. lembaga tersebut bertugas menerima laporan, menelusuri atau menginvestigasi laporan, serta memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Lembaga tersebut berdasarkan UU yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus *Whistleblowing*, seperti LPSK, KPK, Ombudsman, Komisi Yudisial, PPATK, Polri, dan Komisi Kejaksaan.

Dengan demikian, pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan atau kebijakan. Motif seseorang sebagai *whistleblower* dapat bermacam-macam, mulai dari motif itikad baik menyelamatkan perusahaan, persaingan pribadi atau bahkan persoalan pribadi. Bagi pengembangan sistem ini yang terpenting adalah seseorang tersebut melaporkan untuk mengungkap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di perusahaannya bukan motifnya. Jika *whistleblower* sudah melaporkan ke lembaga yang berwenang, seorang *whistleblower* perlu mendapatkan perlakuan yang baik. Perlakuan yang baik itu meliputi adanya jaminan perlindungan terhadap aksi balas dendam.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah komisi *good corporate governance* (X1), dan *whistleblowing* (X2 terhadap variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* (Y).

Agar hubungan antar variabel bebas dengan variable terikat tersebut lebih jelas dapat digambarkan ke dalam model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- > : Uji Simultan
- > : Uji Parsial

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari variabel penelitian, sebagaimana dijelaskan bahwa hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan dari data yang terkumpul. Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian bahwa hipotesis terdiri dari hipotesis nol adalah pernyataan tidak

adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel). Sedangkan hipotesis alternatif yang menyatakan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Dijelaskan pula oleh adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat ini dapat dikatakan sebagai hubungan pengaruh. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu :

H₁ : Terdapat pengaruh antara *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang

H₂ : Terdapat pengaruh antara *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang

2.4 Penelitian Terdahulu

1. (Libramawan, 2017) judul penelitian Pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Survey pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia SO Bandung).

Teknik penggunaan sampel yang digunakan dalam peneltiapienen ini yaitu dengan menggunakan rumus Slovin dikarenakan ukuran populasinya diketahui dengan pasti, dengan sampel yang diperoleh sebanyak 52 karyawan. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana pada taraf signifikansi sebesar 10%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* Ver. 19.00. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan

kecurangan. Sedangkan besar pengaruh penerapan *whistleblowing system* dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap pencegahan kecurangan sebesar 16,3%. Jadi semakin baik penerapan *whistleblowing system* di suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pencegahan kecurangan.

2. (Agusyani, 2016) Pengaruh *whistleblowing system* Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng).

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan jumlah sampel 90 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 19 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara *whistleblowing system* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud*. Secara simultan *whistleblowing system* dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh simultan terhadap pencegahan *fraud*.

3. (Ramdhani, 2018) Pengaruh Audit Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat)

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari seluruh karyawan (kecuali

bagian keamanan dan kebersihan) BPR di Surabaya yang listing di Bank Indonesia sebanyak 186 karyawan. Sampel diambil dengan menggunakan total sampling sehingga total sampel sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 186 karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* BPR di Surabaya yang listing di Bank Indonesia. Penerapan prinsip *good corporate governance* oleh Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya menunjukkan nilai yang sangat tinggi yang berarti penerapan *good corporate governance* sudah sangat baik. Begitu pula pencegahan *fraud* BPR di Surabaya juga menunjukkan nilai yang sangat tinggi yang berarti pencegahan *fraud* BPR di Surabaya juga telah dilakukan dengan sangat baik.

4. (Othman, 2015) *Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions.*

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode untuk mendeteksi dan mencegah penipuan dan korupsi di sektor publik di Malaysia dan efektivitas yang dirasakan sesuai mereka dari sudut pandang akuntan. Penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur (Cates, 1985) pada sampel populasi yang terdiri dari akuntan dan auditor internal dari sektor publik Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan audit operasional, peningkatan komite audit, peningkatan kontrol internal, implementasi kebijakan pelaporan penipuan, rotasi staf, hotline

penipuan dan akuntan forensik adalah di antara mekanisme deteksi dan pencegahan penipuan yang paling efektif yang digunakan di sektor publik. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan ruang lingkup dan efektivitas deteksi dan pencegahan penipuan dan korupsi dalam mesin pemerintah di Malaysia.

5. (Mangala, 2017) *Auditors' Perceptions of the Effectiveness of Fraud Prevention and Detection Methods*

Penipuan telah muncul sebagai cabang yang tidak diinginkan dari keserakahan manusia dan tekanan untuk tampil di dunia korporasi yang berkembang. Ini telah menyebabkan erosi kepercayaan para pemangku kepentingan di seluruh dunia. Sekarang, mereka melihat laporan tahunan dan pengajuan perusahaan lainnya dengan skeptis. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kecurangan, mekanisme anti kecurangan dari organisasi bisnis tidak mutakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas metode deteksi penipuan dan pencegahan yang digunakan oleh sektor korporasi. Sebuah survei terhadap 336 auditor yang mencari persepsi mereka tentang efektivitas berbagai metode anti-penipuan telah dilakukan. Temuan mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan adalah alat paling efektif untuk melawan penipuan. Penggunaan teknologi informasi, audit tepat waktu, inspeksi berkala, serta kebijakan dan prosedur perusahaan, juga memainkan peran penting dalam membatasi praktik penipuan dalam suatu organisasi. Dengan demikian, temuan menunjukkan bahwa pengeluaran untuk

metode anti-penipuan yang efektif tidak boleh dilihat sebagai biaya; sebaliknya, itu harus dianggap sebagai investasi karena menyelamatkan dari potensi kerugian karena penipuan dan kerusakan pada stabilitas, pendapatan, dan citra bisnis

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2013) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. pengertian kuantitatif menurut (Sugiyono, 2017) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan variabel penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) **Data Primer**

Menurut(Widiyoko, 2014), data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, atau dengan kata lain data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung seperti hasil pengisian angket (kuesioner).

b) Data Sekunder

Data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk usulan penelitian ini adalah:

- a. Penyebaran Kuesioner, hasil pengisian kuisisioner dengan menggunakan 5 poin skala likert. Menurut (Rumengan, 2013) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena-fenomena atau gejala sosial yang terjadi.
- b. Penelitian pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku literatur yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi, dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori dan teknik analisis dalam memecahkan masalah.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut (Sugiyono, 2013) “Populasi adalah objek-objek yang mempunyai kuantitatif tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang baik statusnya karyawan tetap dan kontrak maupun alih daya yang berjumlah 63 orang.

3.4.2 Sampel

Menurut (Jemmy Rumengan, 2013) populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang.

Elemen–elemen yang terdapat di dalam populasi disebut juga dengan sampel. Sampling adalah suatu cara yang ditempuh dengan pengambilan sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan obyek penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena menurut (Sugiyono, 2014) jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya.

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diatas, dari populasi sebanyak 63 karyawan PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang diperoleh sampel yang terdiri dari manajemen Bank Bukopin dan seluruh karyawan di PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang yang berjumlah 63 karyawan yang disajikan dalam tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1
Daftar Karyawan PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang

No.	Unit / Bagian	Jumlah Karyawan
1	Branch Manager	1 Orang
2	Branch Sales Manager	1 Orang
3	Manager Operasional	1 Orang
4	Staff Audit	1 Orang
5	HRD	1 Orang
6	Staff Sarlog	2 Orang
7	Marketing Lending	7 Orang
8	Marketing Funding	8 Orang
8	Customer Service	2 Orang
9	Teller	5 Orang
11	Analisis Kredit	2 Orang
12	Admin Kredit	4 Orang
13	Back Office	3 Orang
14	Outsourcing	25 Orang
JUMLAH KARYAWAN		63 Orang

Sumber : PT Bank Bukopin Tbk Tanjungpinang, 2020

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini bertujuan untuk menetapkan indikator dalam melihat variabel penelitian. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel *good corporate governance* (X1) dan *Whistleblowing* (X2), untuk variabel dependen dapat diketahui yaitu Pencegahan *Fraud* (Y). Berikut penjelasan operasional variabel dalam penelitian ini

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1	Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	Penilaian risiko <i>fraud</i> yang efektif akan dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang tidak terdeteksi dan memperkuat kemampuan organisasi dalam mencegah dan mendeteksi <i>fraud</i> serta penyalahgunaan sebelum menjadi skandal bagi instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengorganisasikan penilaian risiko berdasarkan siklus tugas pokok dan fungsi instansi atau siklus kemungkinan terjadinya <i>fraud</i>. 2. Menetapkan unit dan lokasi untuk dinilai 3. Mengidentifikasi skema dan skenario potensi terjadinya <i>fraud</i> dan penyalahgunaan wewenang 	<i>Likert</i>
2	<i>Good Corporate Governance</i> (X1)	<i>Corporate governance</i> adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transparancy</i> (Keterbukaan) 2. <i>Accountability</i> (Akuntabilitas) 3. <i>Responsibility</i> (Pertanggungjawaban) 4. <i>Independency</i> (Kemandirian) 5. <i>Fairness</i> (Kewajaran) 	<i>Likert</i>

		nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha		
3	<i>Whistleblowing</i> (X2)	<p><i>Whistleblowing</i> adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anonimitas 2. Independensi 3. Akses yang mudah 4. Tindak Lanjut 	Likert

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berdasarkan Variabel X dan Variabel Y dengan menggunakan teknik pengolahan data. Pengolahan data meliputi kegiatan:

1. Editing. Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.
2. Coding (Pengkodean). Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.
3. Pemberian skor atau nilai dalam pemberian skor digunakan skala Likert yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor. Skala ini menggunakan 5 kategori:
 - a. Jawaban sangat baik diberi bobot 5
 - b. Jawaban baik diberi bobot 4
 - c. Jawaban cukup baik diberi bobot 3
 - d. Jawaban tidak baik diberi bobot 2
 - e. Jawaban sangat tidak baik diberi bobot 1
4. Tabulasi Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan.

3.7 Metode Analisis Data

Terkait dengan sifat penelitian yaitu membuat analisis deskriptif dan analisis regresi. Analisis deskriptif merupakan pengumpulan, penyusunan, penyajian ringkasan data penelitian yang diringkas dengan baik dan teratur baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafik, sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan. Analisis berupa penyajian data dengan tabel maupun distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang, penjelasan kelompok melalui modus, mean, dan variasi kelompok dengan rentang dan simpangan baku, digunakan untuk menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

Untuk mencari keterkaitan antara variabel-variabel pada model dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan dianalisis dengan regresi linear untuk analisa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen, analisa regresi bertujuan untuk mengetahui koefisien korelasi, koefisien determinasi dan koefisien regresi.

3.7.1 Analisis Kualitas Data

3.7.1.1 Uji Validitas

Untuk mendukung analisis regresi perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan item kuesioner. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti, (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini uji validitas akan dilakukan dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

Adapun metode yang digunakan pada program tersebut dalam menguji kevalidan kuesioner adalah dengan menggunakan metode *person correlation* yaitu dengan mengkorelasikan antar skor tiap item dengan skor total (Ghozali, 2011). Langkah selanjutnya adalah secara statistik, angka korelasi yang diperoleh dengan melihat tanda bintang pada hasil skor total, atau membandingkan dengan angka korelasi nilai r yang menunjukkan besar nilai kevalidan.

Menurut (Ghozali, 2011), metode pengambilan keputusan pada uji validitas biasanya ada dua model yaitu :

1. Menggunakan batasan r_{tabel} dengan signifikansi 0,05 dan diuji dua sisi dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Apabila $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, maka item kuesioner tersebut valid.
 - b. Apabila $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak valid.
2. Menggunakan batasan 0,3 hal ini artinya jika nilai korelasi lebih dari batasan yang ditentukan maka item kuesioner dianggap valid, sedangkan jika kurang dari batasan (0,3) maka item kuesioner dianggap tidak valid.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut(Ghozali, 2011), uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Pada penelitian ini, uji reliabilitas alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan *cronbach alpha*. Statistik ini berguna untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut reliable. Jika nilai Cronbach alpha $\geq 0,6$ menunjukkan bahwa pengukur yang kita gunakan

dianggap reliable artinya jawaban responden akan cenderung sama, walaupun diberikan kepada orang dan bentuk pertanyaan berbeda.

Terkait dengan sifat penelitian ini yaitu menggambarkan secara deskriptif dan pengujian hipotesis, maka data yang telah diolah, disajikan dalam bentuk tabel-tabel frekuensi, grafik dan menggunakan statistik analitik untuk selanjutnya dianalisis lebih lanjut. Untuk mencari keterkaitan antara variabel-variabel pada model dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dengan regresi linear untuk analisa variabel sebagai prediktor dan regresi linear berganda untuk analisa asosiasi variabel. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui koefisien korelasi, koefisien determinasi dan koefisien regresi.

3.7.2 Analisis Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan mengamati penyebaran data pada sumbu diagonal suatu grafik dan dengan uji *One Sample Kolmogrov Smirnov* Ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Metode grafik
 - a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
 - b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Metode Uji *One Sample Kolmogrov Smirnov*

Dalam hal ini guna mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dikatakan terdistribusi normal.

3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2011) Uji Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji heteroskedastisitas dengan cara melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi dengan analisis dasar. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas dan jika ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y.

3.7.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2011) Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DWtest). Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson adalah sebagai berikut:

- Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW diantara -2 sampai +2 ($-2 \leq DW \leq +2$)
- Terjadi autokorelasi negative jika nilai DW ($DW > +2$)

3.7.2.4 Uji Multikolinearitas

Menurut (Duwi Priyatno, 2013) Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Beberapa metode uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Inflation factor* (VIF) pada model regresi atau dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2). Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10 dan mempunyai angka *Tolerance* lebih dari 0,1.

3.7.3 Uji Regresi Linear Berganda

Menurut (Duwi Priyatno, 2013) analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen yaitu *Good Corporate Governance* (X_1), *Whistleblowing* (X_2) terhadap satu variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud* (Y) dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Analisis ini untuk

memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing Y berhubungan positif atau negatif.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + E$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *Fraud*

X₁, = *Good Corporate governance*

X₂ = *Whistleblowing*

a = Konstanta

b₁, = Koefisien regresi GCG (nilai peningkatan ataupun penurunan)

b₂ = Koefisien regresi *Whistleblowing* (nilai peningkatan ataupun penurunan)

E = Nilai residu

3.7.4 Uji Hipotesis

Menurut(Ghozali, 2011), hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. Dalam penelitian yang menggunakan sampel, hipotesisnya menggunakan kata signifikan. Misalnya: “Ada pengaruh signifikan antara *Good Corporate Governance* dengan Pencegahan *Fraud*”. Signifikan ini mengandung arti bahwa hipotesis yang telah

tebukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Dalam hipotesis terdapat hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternative (H_a) yaitu sebagai berikut:

- a. **Hipotesis nihil atau nol hipotesis (H_0)** adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel independen (X_1, X_2) dengan variabel dependen (Y).
- b. **Hipotesis alternative atau hipotesis kerja (H_a)** adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel independen (X_1, X_2) dengan variabel dependen (Y).

3.7.4.1 Uji F (F-test)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu *Good Corporate Governance* (X_1) dan *Whistleblowing* (X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud* (Y) menurut (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi, yaitu: 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_A ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

- b. H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_A diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Dengan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df_1 (jumlah variabel-1) dan df_2 ($n-k-1$, n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen).

3.7.4.2 Uji t (t-test)

Menurut(Ghozali, 2011), uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen yaitu (X_1), (dan (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu (Y).

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi, yaitu: 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. H_0 diterima jika $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$.
- b. H_0 ditolak jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$.

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen).

3.7.5 Koefisien Determinasi

Menurut(Ghozali, 2011), analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini digunakan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun persentase

sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan menjelaskan 100% variasi dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Semendawai. (2011). *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta.
- ACFE. (2017). *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse*. Austin, Texas: Association of Certified Fraud Examiners. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Agusyani. (2016). Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng). *E-Journal Akuntansi*, 6(3), 1–10.
- Akmal. (2012). *Sistem Pengendalian Intern*. Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Atmawinata, S. dan M. R. (2014). *Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit : Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Etikonomi*, Volume 13 Nomor 2. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Baridwan, Z. (2011). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Edisi 5. Yogyakarta : BPPE. <https://doi.org/10.25105/mraai.v15i2.2003>
- Duwi Priyatno. (2013). *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*, Yogyakarta, Mediakom,. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Elias. (2012). *Auditing Student Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship to Whistleblowing*, *Managerial Auditing, Jurnal*, Vol. 23, No. 3, 283-294.
- Fajarwaty. (2011). *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di Lingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog)*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hery. (2011). *Cetakan Kesatu Potret Profesi Audit Internal*. Bandung.
- IAPI. (2011). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

<http://eprints.polsri.ac.id/620/>

- IAPI. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta :
- James, S. (2011). *Internal Auditing, Diterjemahkan oleh: Desi Adhariani, Jilid 1, Edisi 5, Salemba Empat :Jakarta.*
- Kartika, I. (2014). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-komite dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013.*
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.*
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2013). *Pedoman Umum GCG di Indonesia.*
- Libramawan. (2017). *Pengaruh Penerapan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Survey pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia SO Bandung.*
- Mangala, D. (2017). Auditors' Perceptions of the Effectiveness of Fraud Prevention and Detection Methods. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(2).
- Mulyadi. (2014). *Auditing dan Pendekatan Terpadu, Edisi 6, Jilid 1., Salemba Empat, Humanika, Medika, Jakarta.*
- Othman, R. (2015). Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 59–67.
- Pasorong. (2012). *Evaluasi Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Pada Lembaga Perbankan (Studi Empiris Pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk). Accounting.*
- Pratiwi, yohana rahayu. N. (2015). *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada biro keuangan sekretariat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Prosiding penelitian SpeSIA 2015.*
- Ramdhani, R. (2018). *Pengaruh Audit Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada Pt. Pln (Persero) Distribusi Jawa Barat).*
- Rumengan, J. (n.d.). *Metodelogi Penelitian, Bandung, Cipta Pustaka. 2013.*

- Rumengan, J. (2013). *Metodologi Penelitian Dengan SPSS*. Batam: UNIBA PRESS.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 77–109.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Otritas Jasa Keuangan No 7/SEOJK.03/2016*. (2016).
- Sutedi. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwardjono. (2014). *Teori akuntansi: perekayasaan pelaporan keuangan*. BPFE-Yogyakarta.
- Tunggal, A. W. (2014). *Internal Audit, Enterprise Risk Management & Corporate Governance*. Jakarta: Harvarindo.
- Wati, M. L. (2012). *Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Manajemen, Volume 01, Nomor 01, September 2012*.
- Widiyoko, E. P. (2014). *Teknik Penyusunan Variabel Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Widyaiswara. (2011). *Pentingnya Penilaian Resiko Fraud oleh auditor internal audit dalam rangka mendukung penerapan program Anti – Fraud dalam sektor Publik*.
- Wiratna, S. (2015). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

CURICULUM VITAE



Nama : Rini Setiyawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang/18 Maret 1997

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : rini.setiyawati18@gmail.com

Alamat : Jl. Rambutan, Lr. Ceremai Dalam No.41

Nama Orang Tua

Ayah : Sogiyat

Ibu : Suhati

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 011 Tanjungpinang Barat 2009
2. SMPN 3 Tanjungpinang 2012
3. SMAN 5 Tanjungpinang 2015
4. STIE Pembangunan Tanjungpinang 2020